

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan sebuah media bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya, laporan keuangan sangat penting bagi pemerintahan, yakni untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan sebagai evaluasi tentang hasil-hasil yang sudah dicapai oleh pemerintah pada satu periode anggaran yang bersangkutan. Pemerintah pusat harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Tak hanya pada pemerintah pusat saja yang harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah, provinsi, atau kota/kabupaten beserta seluruh badan dinas dan instansi juga harus mampu membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Dengan adanya pedoman penyusunan laporan keuangan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun secara efektif dan efisien sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Motivasi dilakukannya penelitian ini terdorong oleh fenomena yang menunjukkan bahwa ternyata dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak penyimpangan-penyimpangan dan masih banyaknya penyajian data yang tidak sesuai, yang bisa dilihat dari IHPS I Tahun 2019.

Berdasarkan IHPS I Tahun 2019, BPK mengungkapkan ada 9.116 temuan yang memuat 14.965 permasalahan, yang meliputi 7.236 (48%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.636 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp9,68 triliun, serta 93 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,49 triliun.

Menurut laporan audit IHPS I tahun 2019, BPK memeriksa 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD tahun 2018. Dari 542 LKPD tahun 2018 tersebut BPK memberikan 443 opini WTP (82%), 86 opini WDP (16%), dan 13 opini TMP (2%). Opini WTP dicapai oleh 32 dari 34 pemerintah provinsi sebesar (94%), 327 dari 415 pemerintah kabupaten sebesar (79%), dan 84 dari 93 pemerintah kota sebesar (90%). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 kualitas LKPD tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 6 poin dari 76% pada 2017 menjadi 82% pada 2018 yang berarti menunjukkan kenaikan kualitas LKPD.

Perkembangan opini LKPD dalam 5 tahun terakhir (2014-2018), opini LKPD mengalami perbaikan, LKPD yang memperoleh WTP naik 35%, yaitu dari 47% pada 2014 menjadi 82% pada 2018. Sementara itu LKPD yang memperoleh opini WDP dan TMP mengalami penurunan sebesar 30% (dari 46% menjadi 16%) dan 4% (dari 6% menjadi 2%). Berdasarkan tingkat pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2017 terjadi penurunan opini WTP pada pemerintahan provinsi dari 33 LKPD (97%) menjadi 32 LKPD (94%), dan hasil pemeriksaan lainnya juga menunjukkan adanya kenaikan opini TMP menjadi

WDP pada 6 LKPD, opini WDP menjadi WTP pada 46 LKPD. Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan LKPD Tahun 2017, tetapi terdapat 15 dari 542 (3%) LKPD yang mengalami penurunan opini, yang menunjukkan bahwa penurunan opini lebih banyak dibandingkan penurunan opini tahun 2017 sebanyak 14 dari 542 LKPD.

Naik turunnya kualitas LKPD ditentukan oleh seberapa baik sistem pengendalian intern pada LKPD. Dalam IHPS I Tahun 2019, hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD Tahun 2018 ditemukan 5.858 kelemahan SPI yang terdiri atas 1.826 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.752 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.279 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. permasalahan SPI ini dikarenakan:

- 1) Kurangnya pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan, dan belum optimalnya pengawasan dan pengendalian.
- 2) Aplikasi pencatatan dan pelaporan masih tergolong lemah.
- 3) Pemda belum menyempurnakan kebijakan akuntansi.
- 4) Kurang cermatnya dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja.
- 5) Kebijakan SOP yang belum tersusun.
- 6) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap pajak dan retribusi.

Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Kabupaten Demak selama 4 tahun, dari tahun 2012 sampai tahun 2015, BPK memberikan

opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan selama 3 tahun, dari tahun 2016 sampai tahun 2018 BPK memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Kabupaten Demak Tahun 2012-2018

Tahun	Opini BPK
2012	Wajar Dengan Pengecualian
2013	Wajar Dengan Pengecualian
2014	Wajar Dengan Pengecualian
2015	Wajar Dengan Pengecualian
2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2016 sampai dengan 2018 Kabupaten Demak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya opini LKPD Demak meningkat dari 2012 sampai dengan 2018. Meskipun opini yang diberikan oleh BPK adalah WTP, namun masih ada beberapa catatan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang terkait dengan SPI adalah, penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum dilaksanakan dengan tertib, antara lain tanah belum bersertifikat dan belum tercatat di KIB, pemanfaatan aset tanah belum didukung dokumen, aset peralatan

dan mesin tidak ditemukan, kendaraan belum dilengkapi BPKB, dan perumahan belum menyerahkan PSU Kepada Pemda (sumber: Suara Merdeka)

Kelemahan sistem pengendalian intern pada LKPD menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang lemah, Menurut Nasrudin (2008) sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan, karena sumber daya manusia memiliki nilai tinggi bagi instansi berdasarkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya sumber daya manusianya saja, melainkan kompetensi sumber daya manusianya. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi atau pemahaman akuntansi, maka laporan keuangan akan cepat selesai dan disajikan tepat pada waktunya.

Selain itu pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Adanya pengaruh SAP pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu, SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat beserta departemen-departemennya maupun pemerintah daerah beserta dinas-dinasnya (Nordiawan, 2006). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang sudah ditetapkan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Dalam SAP laporan berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah merevisi PP No.24 Tahun 2005 dengan PP No.71 Tahun 2010 yaitu tentang SAP berbasis akrual.

Dalam menilai ketepatan pelaksanaan kebijakan dan tindakan koreksi dalam sebuah organisasi maka diperlukannya peran pengawas yaitu audit internal, yang bertujuan agar tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Internal audit merupakan sumber informasi yang penting bagi auditor eksternal (BPK), karena internal audit sebagai ujung tombak dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil audit yang berkualitas harus didukung dengan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, karena jika kualitas pada audit rendah, maka kemungkinan akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangannya.

Sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah mengacu pada PP No.65 Tahun 2010 yang mewajibkan setiap pemerintah daerah menerapkan sistem informasi keuangan daerah dalam rangka untuk mengelola keuangan daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sangat penting, karena dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan program yang mendukung sistem informasi keuangan daerah, sehingga terciptanya laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Penelitian Hanaffi (2017) tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati)”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman SAP, peran internal audit, dan kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

sedangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Kiranayanti, dkk (2016) tentang “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman basis akruaI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian Syarifudin (2014) tentang “Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan peran audit intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan apabila sistem pengendalian intern pemerintah memediasi kompetensi sumber daya manusia dan peran audit intern.

Jadi pada penelitian ini mereplikasi dari penelitian Hanaffi (2017), dan menambahkan variabel Sistem Pengendalian Intern dari penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2014) dan Kiranayanti (2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang dikemukakan di atas ditemukan adanya 5.858 kelemahan SPI yang terdiri atas

1.826 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.752 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.279 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta (2017) sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas LKPD. Sedangkan pada penelitian Kiranayanti (2016) dan Syarifudin (2014) sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : bagaimana peran sistem pengendalian intern dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ?.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Bagaimana pemahaman SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Bagaimana sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Bagaimana pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Bagaimana peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Untuk menganalisis peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1.5.1 Aspek Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi keuangan.

1.5.2 Aspek Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam memberikan masukan dalam pengambilan keputusan.